BAB III

KONDISI SOSIAL POLITIK MESIR

A. Sejarah Mesir

Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usia nya sudah lebih dri 5000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari guru sahara, Afrika. Selama tiga ribu tahun Mesir dipimpin oleh Firaun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti, yang jumlah 140 Firaun yang berkuasa dari tahun ketahun. Mesir kuno di bagi menjadi 3 era, Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom. Setelah Era New Kingdom, Kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh Suku dari luar yaitu suku Romawi (Oleh The Great Alexander), Arab, Turki (oleh Kesultanan Ottoman/Utsmaniyah). Peninggalan peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangat banyak, contohnya ada Piramida Giza di Giza, Spinx (Giza), Lembah para raja, Red Pyramid, Piramida Sakkara, Kota Memphis (kota Mesir kuno).

Mesir adalah negara Arab paling banyak penduduknya. Sekitar 74 juta orang, yang menempati wilayah Mesir. Hampir seluruh populasi penduduknya terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariyah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez. Hampir 90 %

populasi masyarakatnya adlah pemeluk Islam dan sisanya Kristen (Coptik).[1]

Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Muhammad Husni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Muhammad Anwar Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmad Nazhif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Athaf Ubaid.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi presidensial multipartai. Secara teoretis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.

Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh,

---

[1] Putri Meilasari, *Mesir Pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat: Upaya Anwar Sadat dalam Perdamaian Mesir Israel*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), p. 2

seperti Aiman Nur, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.

Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang berkuasa Husni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Husni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Husni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.

Pada 4 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fattah as-Sisi mengumumkan adanya revolusi untuk mengamankan Mesir, yang bertujuan untuk menggulingkan Muhammad Mursi. Mursi sendiri adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokrasi. Pada 3 Juni 2014, Komisi Pemilihan Mesir mengumumkan, mantan Jenderal Mesir, Abdul Fattah as-Sisi terpilih menjadi Presiden setelah menang dalam Pemilu Mesir pada Mei 2014.[2]

Beberapa catatan sejarah ringkas diatas merupakan sebagai pengantar penulis tentang sejarah peradaban Mesir. Karna melihat dari sisi sejarah, Mesir merupakan negara yang sangat penuh dengan catatan kesejarahan. Maka untuk mendeskripsikan kondisi Politik-Sosial Mesir secara utuh harus dilakukan dalam pembahasan yang khusus. Dalam

[2] Wikipedia, *Mesir*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir, (Diakses pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017, pukul 19.25 Wib)

kesempatan ini penulis akan melakukan spesifikasi kondisi Politik-Sosial Mesir sensuai dengan tema yang penulis angkat yaitu yang berhubungan dengan Farag Fouda.

B. Kondisi Sosial Politik Mesir

Penduduk Mesir beragam, ada pengaruh dari Mediterania (seperti Arab dan Italia) dan arab muncul di utara, ada beberapa penduduk asli hitam di daerah selatan. Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenak dengan berbagi menara Masjid dan Gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui Madzhab Hanafi lewat Kementrian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar, yang memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama. Penduduk Mesir yang menganut agama Islam sebanyak 90%, mayoritas Sunni dan dan sebagian juga menganut Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen, yang terdiri dari Kopti-Ortodok, Katolik Koptik dan Protestan Koptik.[3]

---

[3] Putri Meilasari, *Mesir Pada Masa* ..., p. 3

Sudah menjadi rahasia umum bagi seluruh umat muslim dibelahan dunia manapun mengakui bahwa sampai saat ini Mesir merupakan lambang mercusuar dan lokomotif pemikiran Islam dunia. Hal ini tersimbol dengan adanya Al-Azhar sebagai pusat dan centrum pendidikan dan pemikiran Islam sendiri. Seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa perdebatan yang mengangkat isu-isu tentang hubungan agama-negara, penerapan syari'at Islam dan institusi khilafah telah terjadi dalam kurun waktu yang terhitung lama yang melibatkan dua kubu. Dalam konteks polarisasi ideologis di Mesir ketika itu, kubu pertama adalah sekuleris, dan kubu kedua adalah Islamis.[4]

Perdebatan politik yang terjadi dalam polarisasi ideologis di Mesir mencapai puncaknya pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Pada masa ini, gelombang Islamisme menerpa negara-negara Timur Tengah termasuk Mesir. Dari gelombang ini muncul berbagai kelompok radikal dan ganas yang belum tentu saling menyukai satu sama lain. Mereka menyerang gereja Kristen Koptik, memalak bisnis mereka, meneror pejabat pemerintah yang menurut mereka lalim dan menyerang wisatawan asing yang datang ke Mesir untuk mengagumi berhala dan warisan Fir'aun. Salah satu diantara kelompok ganas ini adalah Jamaah

---

[4] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah, terj. Novriantoni dengan judul "Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim",* edisi digital, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), p. x

Islamiyah pimpinan Syeikh Umar Abdurrahman, yang belakangan terkenal karena keterloibatannya dalam serangkaian serangan terorisme, termasuk di Amerika Serikat.[5]

Hal demikian, memicu ketegangan sosial-politik yang mengakibatkan pertempuran ideologis antara kelompok kanan (Islamis) dan kelompok kiri (sekuleris) di Mesir pada saat itu. Kalangan Islamis terus mengkampanyekan tentang tuntutan utama mereka seperti tuntutan pembentukan negara Islam dan penerapan syari'at Islam di Mesir. Tuntutan-tuntutan tersebut pada mulanya tidak direspon secara konfrontatif oleh kalangan sekuleris, pada masa ini mereka mulai tampil berani dalam melakukan perlawanan dan penentangan terhadap tuntutan kaum Islamis melalui debat publik maupun polemik di media masa. Di antara para kritikus yang menentang tuntutan kalangan Islamis, Farag Fouda adalah yang paling berani dan lantang diantara kritikus ini. Juru bicara lain adalah Muhammad Said Al-Asymawi (lahir 1932), Salah Isa, Rifat Al-Said, Mustafa Al-Faki, Muhammad Hasanain Haikal, Usama Al-Baz. Tulisan-tulisan mereka dengan tajam mengupas kelemahan-kelemahan dalam pandangan kaum Islamis.[6]

Pada masa yang sama, tuntutan penerapan syari'at Islam di Mesir sudah menjadi wacana publik yang menjangkau masyarakat luas

---

[5] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xi
[6] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xii

dan tak terbatas dilingkungan ulama. Karenanya, kontroversi tentang gagasan negara Islam atau penerapan syari'at Islam memiliki efek yang lebih luas dimasyarakat yang meiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perlawanan Farag Fouda dalam menentang kelompok Islamis berujung kepada kematiannya pada tahun 1992 karena telah dianggap murtad dan keluar dari Islam oleh sekelompok ulama dari Al-Azhar dan dibunuh oleh kelompok yang mengatas namakan Jama'ah Islamiyah.

Selain Farag Fouda yang menjadi korban daripada keganasan kaum radikal Mesir saat itu, Najib Mahfuz menjadi sasaran lain dari kelompok radikal. Najib Mahfuz, pemenang Nobel kesusatraan pada 1988, masih mengajak pembacanya supaya menggunakan cara-cara damai dalam menangani dan menyelesaikan perang saudara tersebut. Bertukar pikiran dan berdialog adalah proses tanpa ujung. "Agresi tidak dapat dibenarkan. Diskusi, bukan kekerasan, adalah cara menangani perbedaan pandangan", katanya saat mengomentari kemarian Fouda. Tetapi, Mahfuz sendiri, pada 14 Oktober 1994, ditikam berkali-kali oleh orang-orang yang bermaksud membunuhnya. Hanya berkat pertolongan Allah, sastrawan besar yang ketika itu berumur 82 tahun dan saki-sakitan, dapat selamat dari serangan pengecut yang mengaku melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Syeikh Umar Abdurrahman.[7]

---

[7] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xii

Sebagaimana telah telah kita ketahui dan disampaikan diawal, bahwa Farag Fouda adalah salah satu pemikir Islam sekuleris Mesir dengan latar belakang pendidikan yang tidak secara langsung bersentuhan dengan bidang keislaman. Dia hanyalah seorang doktor dalam bidang ekonomi dan pertanian. Fenomena munculnya pemikir politik Islam yang tidak berlatar belakang pendidikan Islam di Mesir dan mencoba bertarung wacana bukan merupakan hal mengherankan. Pasca-kekalahan Arab dalam perang Enam Hari Melawan Israel (1967), gejala pemikir liberal yang membawa semangat sekularisme dunia Arab mulai muncul. Terdesak oleh wacana kubu Islamisme yang menyederhanakan faktor penyebab kekalahan karena faktor-faktor agama, mereka lalu tertarik untuk memperdebatkan tentang hubungan Islam dengan Isu-isu modern. Fouda memaparkan tafsir baru atas Islam sekaligus menawarkan jalan bagaimana seharusnya umat Islam melihat masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang secara jujur.[8]

Sebelum era Farag Fouda yang mengkampanyekan gagasannya tentang pemisahan politik dari agama, antara negara dan Islam di Mesir, telah ada salah satu tokoh yang meiliki pemikiran yang persis dengan Fouda, yaitu Ali Abdul Raziq (1888-1966). Ali Abdul Raziq merupakan

---

[8] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan Farag Fouda tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Siyasah Syar'iyyah, (*Medan: Prodi hukum, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2014*)*, p. 43-44

tokoh pembaharu Islam yang berasal dari Mesir. Sebagaimana Farag Fouda, Ali Abdul Raziq memiliki prinsip dan paradigma yang sama dalam persoalan hubungan agama dan negara, yaitu pradigma sekuleristik yang memisahkan anatar agama dan negara. Ali Abdul Raziq mempunyai pemikiran yang ditentang banyak kalangan, terutama para pemikir pembaharu Islam. Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku berjudul *Al-Islam Wa Ushulul Al-Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya yang tertuang dalam buku tersebut adalah tentang sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Dia berpendapat bahwa agama tidak ada kaitannya sama sekali denga negara.[9]

Mengenai masalah institusi Khilafah, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Islam itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kekhalifahan, karena kekhalifahan bukanlah suatu sistem yang Islamis atau bercorak keagamaan. Ia hanyalah sistem keduniaan yang sepenuhnya berbeda dengan agama serta memiliki tujuan-tujuan yang bercorak dunia. Ali Abdul Raziq mengutip suatu riwayat yang menceritakan bahwa ketika jabatan khalifah ditawarkan kepada Abu Bakar, diusulkan dengan sebutan Khalifah Allah, tetapi Abu Bakar menolaknya dan berkata: Aku bukan khalifah Allah melainkan khalifah Rasulullah. Dengan demikian, maksud

---

[9] Sejarah dan Pemikiran Ali Abdul Raziq, http://educationword1.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-dan-pemikiran-ali-abdul-raziq.html. (Diakses pada hari senin 09 Oktober 2017, pukul 20.13 Wib)

khalifah bagi Abu Bakar adalah mengurus kepentingan rakyat yang berhubungan dengan dunia. Bagi Ali Abdul Raziq, baik Alquran maupun hadis tidak pernah menyebutkan *term* khalifah dalam pengertian pemimpin negara. Term *ulil amri* yang termuat dalam Alquran Surat An-Nisa (4) : 59 diartikannya sebagai para tokoh Islam di masa Rasulullah dan masa sesudahnya, termasuk para khalifah, para qadhi, para komandan perang dan bahkan para ulama. Untuk itu, tidak tepat jika ayat tersebut dijadikan dasar yang mewajibkan pengangkatan khalifah, karena ayat tersebut hanya menunjukkan bahwa di kalangan kaum muslimin terdapat sekelompok orang yang menjadi panutan bagi beberapa pesoalan yang muncul. Dengan demikian, ayat itu lebih luas daripada memberikan keputusan tentang wajibnya mendirikan khilafah.[10]

Selain dari Ali Abdul Raziq yang menjadi tokoh gerakan pembaharuan Islam di Mesir, masih banyak tokoh lain yang menjadi pelopor gerakan pembaharu dalam wacana-wacana keislaman. Mesir, sebagaimana diketahui, merupakan surga bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru yang rindu akan kemajuan Islam dan ilmu pengetahuan modern yang berjalan secara sinergis. Tidak dapat dipungkiri, hasil interaksi dengan dunia luar, khususnya Perancis di bawah Napoleon

---

[10] Haris Mubarok, *Ali Abdul Raziq (Pemikir dalam Pembaharuan Islam)*, http://harismubarak.blogspot.co.id/2012/09/ali-abdul-al-raziq-pemikir-dalam_9270.html. (Diakses pada hari selasa, tanggal 10 Oktober pukul 23.27 wib)

Boneparte yang pernah menjajah Mesir telah memulai persinggungan itu. Mesir banyak menelurkan pemikir-pemikir yang memberikan semangat pembaharuan, sebut saja Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, di masa awal dan beberapa nama seperti Muhammad Said Al-Asymawi (lahir 1932), Salah Isa, Muhammad Husain Haikal, Ahmad Khalafallah, Fuad Zakaria serta Farag Fouda sendiri di generasi selanjutnya. Yang paling penting adalah bahwa kebanyakan tulisan-tulisan mereka merupakan kritik atas kelemahan-kelemahan dan cara pandang kaum Islamis.[11]

Perang gagasan yang terjadi dalam polarisasi ideologis antara kaum sekuleris dan kaum Islamis yang terjadi di Mesir saat itu tidak berhenti sampai kepada terbunuhnya Fouda, melainkan terus berlanjut dengan cara sweeping dan memberangus buku-buku karya penulis sekuler. Pasca kematiannya, di meja Fouda ditemukan setumpuk surat ancaman dari kelompok radikal dan ekstrimis. Di bulan Juli 1990, ulama Al-Azhar berhasil meminta supaya buku Fouda yang mengecam syeikh Al-Azhar ditarik dari peredarannya. Lima buku Al-Asymawi, disita utusan Al-Azhar dari pameran buku Kairo setelah Presiden Mesir tak sudi memenuhi tuntutan mereka supaya buku-buku diberangus.[12]

---

[11] Alex Madani, *Studi Analisis Pandangan...*, p. 44
[12] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xv

Pemrintah Presiden Husni Mubarak (berkuasa sejak 1981) juga terlibat perang saudara melawan kelompok garis keras dan ekstrem. Sesekali, pemerintah memenuhi tuntutan mereka supaya buku, film atau acara televisi tertentu dihentikan. Tetapi, pemerintah juga tak segan memakai kekerasan, dengan menggunakan aparat militer, polisi dan pengadilan militer khusus. Bahkan, serupa kelompok ekstrimis, aparat keamanan memiliki daftar nama yang akan menjadi target operasi pembunuhan bukan yangb akan ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Amnesti Internasional dalam laporannya mengatakan bahwa aparat keamanan Mesir tampak diberi izin membunuh tanpa perlu kuatir akan diadili.[13]

Lebih lanjut bahwa menurut Fouda dalam setiap perhelatan kontestasi politik yang berlangsung di Mesir, betapa banyak sloganisme seperti *"Wahai Negara Islam, Kembalilah !", "Islam adalah Solusi"* yang dalam pandangan Fouda memiliki konotasi yang tidak baik dalam melihat kehidupan sosial-keagamaan di Mesir. Ungkapan atau slogan-slogan yang dikumandangkan tersebut memiliki pra-anggapan bahwa masyarakat Mesir adalah masyarakat jahiliyah, atau jauh dari agama yang benar. Padahal masyarakat Mesir saat ini sama sekali bukanlah masyarakat jahiliyah, namun lebih tepat dikatakan sebagai masyarakat yang lebih

---

[13] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. xv-xvi

mendekati purwarupa, masyarakat yang paling dekat kepada nilai-nilai Islam yang benar kalau bukan paling dekat yang esensial, bukan simbolis. Paling dekat dengan keyakinan Islam terdalam, bukan pamer keteguhan berpegang terhadap simbol-simbol agama. Bahkan keteguhan berpegang pada nilai-nilai agama yang orisinil itu dapat kita katakan sebagai ciri khas orang Mesir.[14] Dalam pandangan Fouda, ketekunan dan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk datang ke mesjid, berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah calon jama'ah haji dan kegembiraan masyarakat yang meluap ketika menyambut perayaan-perayaan agama merupakan beberapa indikator yang menandakan masyarakat Mesir adalah masyarakat yang taat dalam mengamalkan ajaran Islam.

Bahkan bulan Ramadhan telah menjadi perayaan keagamaan nasional yang tidak dapat dilupakan. Antusiasme dengan kehadirannya dan kesedihan lantaran berlalunya Ramadhan, tiada lain menunjukan otentisitas dan kedalaman perasaan keagamaan itu sendiri. Ini belum ditambahkan dengan sumbangsih pemikiran orang-orang Mesir terhadap kemajuan pembahasan tentang akidah dan ijtihad, dimulai dari al-Laits bin Saad, fikih Imam As-Syafi'i, dan ditambah lagi dengan keberadaan dan universitas al-Azhar sebagai mercusuar pemikiran Islam.[15]

---

[14] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 11-12
[15] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 12

Menurut Fouda bahwa konsep pendirian negara Islam dan penerapan syari'at Islam yang menjadi gagasan dan tuntutan dari kalangan Islamis tidak memberikan agenda dan panduan politik secara terperinci kepada masyarakat. Agenda politik terperinci itu akan menjadi panduan mereka untuk memerintah kita dan andaikan pula dapat memberi jalan keluar terhadap problem kita, seperti sistem pemerintahan dan tatacaranya, agenda reformasi dibidang politik, ekonomi, kebudayaan dan juga perbaikan sistem pendidikan, soal perumahan, dan tatacara menuntaskan persoalan itu dari sudut pandang Islam.[16]

Dalam pandangan Fouda bahwa semangat dalam berijtihad harus tetap hidup dan ada dalam rangka mencari formulasi yang sesuai dengan kehidupan di zaman yang sudah begitu maju. Bagaimana konsep negara Islam yang diusung oleh kelompok Islamis dalam menghadapi pelbagai persoalan yang ada saat ini. Sebagai contoh mengenai gerakan emansipasi perempuan dan kesetaraan, persoalan investasi dalam badan usaha milik negara, sistem kredit dan sewa perumahan sampai kepada sisitem pemilihan kepemimpinan yang kesemuanya tidak memiliki presenden yang baku dari para mujtahid fiqih. Kandungan ideologis dan

[16] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 14

kerangka konstitusional menjadi faktor-faktor amat penting dalam menentukan watak sebuah negara Islam.[17]

Undang-undang keluarga adalah bagian terkecil dari agenda politik Islam yang lebih luas. Bahkan ia dapat dikatakan sebagai bagian yang teremeh dari aspek penerapan syari'at Islam. Namun tidak ada yang mengingkari bahwa ini adalah satu-satunya undang-undang yang masih menjadikan syari'at sebagai satu-satunya sumber inspirasinya. Pada undang-undang ini paras keagamaan Islam tampak paling jelas. Akan tetapi persoalan datang tatkala ulama menentang semangat dunia baru kita. Yaitu, kenyataan sosial bahwa perempuan kini juga mulai menuntut hak-hak yang dulu tidak mereka hiraukan. Keinginan mereka keluar ruamh dan berkarir misalnya tidak dapat kita abaikan lagi saat ini. Semua itu adalah hak mereka yang tidak dapat kita nafikan lagi. Itu adalah kenyataan sosial baru di dalam masyarakat yang tidak ada preseden sebelumnya, baik pada masa Imam Malik, Abu Hanifah, As-Syafi'i maupun Ibnu Hanbal.[18]

Lalu bagaimana pula mengatasi persoalan yang lebih kompleks seperti persoalan ekonomi dengan syariat? Para pendukung penerapan syariat tampaknya memang peduli dengan soal peningkatan produktivitas

---

[17] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, edisi digital*, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), p. 7

[18] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p.16-17

masyarakat. Namun, mereka dikejutkan oleh besaran investasi disektor badan usaha milik negara yang mencapai 30 sampai 50 miliar Pound Mesir. Semua itu bergantung pada keuangan yang ditopang oleh investor yang menitipkan uang di bank-bank konvensional. Investasi itu misalnya dalam bentuk deposito yang menjanjikan bunga. Ijtihad fikih yang diproduksi pada abad ke-2 hijriyah, sama sekali belum mengenal badan usaha milik negara atau dunia perbankan, menyebutkan bahwa pemasukan yang tetap dari uang yang ditabung termasuk kategori riba.[19]

Inilah persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat masa kini di dunia manapun termasuk Mesir. Andaikan para pengusung negara Islam tidak memiliki konsep dan agenda politik yang terperinci, dan tidak melakukan ijtihad sebagai usaha memberikan formulasi dalam menhadapi tantangan zaman, maka ini akan menjadi sebuah petaka. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah menggambarkan kenyataan empiris terlebih dahulu secara akurat (*taswir al-waqi*). Hal ini jauh lebih mudah daripada mengubah keadaan (*tatwir al-waqi*).[20]

Seperti itulah gambaran kondisi sosial-politik masyarakat Mesir saat Fouda mengkampanyekan gagasannya dalam wacana sekulerisme antara negara dan agama. Beberapa argumentasi Fouda tentang kelemahan-kelemahan agenda dan tidak adanya acuan politik terperinci

---

[19] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 18
[20] Farag Fouda, *Al-Haqiqah Al-Ghaibah...*, p. 18

yang ditawarkan kalangan Islamis kepada masyarakat Mesir pada saat itu mengharuskan Fouda menentang gagasan kalangan Islamis. Pada akhirnya kedua kubu bertahan dengan argumentasi politik-ideologis masing-masing. Oleh sebab itu, debat sekulerisme dan Islamisme di Mesir sangat sulit diselesaikan secara konstruktif karena belum ada kriteria atau prinsip yang disepakati bersama.

Debat publik, polemik di media masa dan bahkan tindakan kekerasan seperti serangan teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh kalangan Islamis terhadap lawan-lawan mereka ternyata tidak dapat menaklukan penentang penerapan syari'at Islam dan pembentukan negera Islam di Mesir. Begitu pula, bukti dan kebenaran sejarah yang ditunjukan Fouda tidak dapat mengubah pendirian kaum Islamis. Akan tetapi kenyataan diatas sebenarnya menjadi alasan kuat untuk mencari jalan baru, yaitu toleransi.

Terbunuhnya Farag Fouda merupakan luka yang sangat mendalam bagi dunia pemikiran Islam dan Hak Asasi Manusia. Tragedi tersebut, menunjukan betapa kejamnya perang saudara-ideologis di Mesir saat itu. Akan tetapi, Farag Fouda telah memberikan sumbangan, melalui karyanya dan juga kematiannya, kepada arti kemajemukan di masyarakat Mesir. Sebagai putera Mesir asli, dengan keberaniannya ia telah

mengkritik apa yang menurutnya merupakan religiusitas yang keliru di masyarakat termasuk di kalangan ulama.

C. Gerakan Keagamaan Di Mesir[21]

Modernisasi di Mesir yang dimulai semenjak masa invasi Napoleon Bonaparte (1798), dan di masa pemerintahan Muhammad ‘Ali (1805-1849 M) semakin gencar dilakukan, memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran keislaman di Mesir. Di mana sekembalinya mereka di Mesir, anggota kelompok-kelompok studi ini membangun sekolah-sekolah model Barat. Sekolah-sekolah ini mengajarkan bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai yang dipinjam dari Barat, khususnya dalam metodologi sains, dengan ajaran-ajaran Syari’at Islam yang didasarkan pada al Qur’an dan ajaran-ajaran Nabi. Hal itu melahirkan beragam reaksi dari umat Islam di Mesir. Ada yang membela mati-matian, ada yang menentang habis-habisan. Sebagian reaksi dari para penentang ini sampai pada batas pengkafiran seseorang (takfîr), pembunuhan terhadap turis Barat, atau kadangkala melenyapkan pejabat tinggi Mesir yang dianggap berkhianat terhadap Islam. Mereka sering disebut sebagai kelompok fundamentalis Islam.

---

[21] Hammis Syafaq, “*Menggali Akar Gerakan Fundamentalisme Islam di Mesir (Jama’ah al-Takfir wa al-Hijrah dan Jama’ah al-Jihad)”,* Artkel, http://pesantren-iainsa.blogspot.co.id/2009/02/menggali-akar-gerakan-fundamentalisme.html

Pada awalnya, kelompok fundamentalisme Islam di Mesir adalah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Ismailiyyah pada tahun 1928 di bawah pimpinan Hasan al-Bannâ (1906-1949). Kelompok ini muncul sebagai respon terhadap krisis modern di dunia Arab, yaitu pada saat Mesir menghadapi tantangan kolonialisme, ketergantungan ekonomi dan budaya, perkembangan industrialisasi dan urbanisasi, serta ledakan penduduk yang pesat. Salah satu tokohnya, Sayyid Qutb (yang dieksekusi pada tahun 1966), mengarang buku berjudul Ma'âlim fi al Tariq yang isinya menolak sistem sosial Mesir modern dan menyebutnya sebagai sistem jahiliyah karena bertentangan dengan sistem islami seperti yang diidamkan oleh kelompok Ikhwan.

Pada periode selanjutnya muncul kelompok Misr al-Fatât, sebuah kelompok sayap kanan yang didirikan pada tahun 1933 oleh Ahmad Husain. Derek Hopwood dan Selma Hotman mencatat bahwa kelompok ini menjadi kelompok yang radikal bersama Ikhwanul Muslimin pada tahun 1945-1952 M, apalagi setelah berubah namanya menjadi Partai Islam Nasional pada tahun 1940 M. Kelompok ini menjadi partai politik pada tahun 1938. Dalam slogannya disebutkan "bahwa orang Mesir dilarang berbicara selain dengan bahasa Arab, dan tidak boleh menjawab pertanyaan orang lain yang tidak menggunakan bahasa Arab, dilarang

membeli sesuatu dari orang asing, kecuali jika sesuatu itu produk bangsa Mesir".

Kedua kelompok Islam garis kanan ini di masa pemerintahan Gamâl 'Abd al-Nâser (m. 1956-1970 M) mendapatkan dukungan dari pemerintah dan rakyat Mesir. Hal ini dikarenakan Gamâl, pada awalnya, begitu dekat dengan ulama' dan beberapa kelompok Islam garis kanan itu, bahkan pengangkatannya sebagai Presiden juga tidak lepas dari dukungan kelompok Ikhwan al-Muslimin. Gamâl memiliki kharisma yang tinggi di mata rakyat Mesir. Dengan gagasannya tentang Nasionalisme ia dianggap mampu mempersatukan bangsa Mesir. Karena keberhasilannya itu, ia dijuluki sebagai Bapak Nasionalisme Mesir. Dari kemampuan Gamâl di dalam menyatukan bangsa Mesir itu, banyak penulis yang menyebutkan bahwa masa pemerintahan Gamâl adalah masa keemasan bagi bangsa Mesir.

Akan tetapi, dalam kelanjutannya Gamâl banyak melakukan kebijakan yang mengecewakan kelompok-kelompok Islam garis kanan itu, di antaranya dengan mengakhiri status al Azhar yang semi-independen, menambah jurusan umum (sekuler) dalam Universitas al Azhar, dan melarang gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954 M.

Akhirnya, Gamâl pun menjadi sasaran rencana pembunuhan dari kelompok Islam militan di atas di Alexandria (Iskandaria), namun ia

selamat dari pembunuhan. Gamâl yang selamat dari usaha pembunuhan itu mulai memburu orang-orang Ikhwan secara sungguh-sungguh. Ia memenjarakan ratusan anggota Ikhwan, termasuk Hasan al-Bannâ dan Sayyid Qutb, yang saat itu mempunyai pengaruh yang luar biasa atas orang-orang Ikhwan dan kelompok-kelompok Islam ekstrem lainnya. Akhirnya hubungan Gamâl dengan kelompok Islam menjadi retak.

Karena keretakannya dengan kelompok Islam, pada tahun 1960-an, Gamâl menjadikan Komunis sebagai alternatif yang efektif bagi pemerintahannya, sehingga Islam militan menjadi sumber oposisi. Dalam upayanya membendung kekuatan oposisi ini, banyak pemimpin ideologi Islam radikal, seperti Sayyid Qutb pada tahun 1966, dieksekusi oleh Gamâl.

Ketika Gamâl digantikan oleh Anwar Sâdât (1970 M), kalangan Islam dan mahasiswa diberikan kebebasan, sehingga gerakan Islam semakin banyak bermunculan. Alasan Saddat untuk memberikan kebebasan kepada mereka adalah untuk melawan pengaruh pengikut setia Nasser. Akhirnya banyak bermunculan masjid-masjid independen yang tidak dikontrol oleh pemerintah, dan menjadi tempat yang aman bagi kelompok-kelompok militan untuk berkumpul di dalamnya dan merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Pada tahun 1973, muncul kelompok Jamâ'ah al-Takfîr Wa al-Hijrah di bawah kepemimpinan Ahmad Shukri

Mustafa, salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin di Asyut yang dipenjara pada tahun 1965 dan mengikuti ajaran Qutb yang radikal ketika berada di penjara. Ketika ia dibebaskan pada tahun 1971, ia mulai merintis untuk mendirikan kelompok Jama'ah al-Takfir wa al-Hijrah ini. Kelompok ini mengklaim bahwa masyarakat Mesir yang berada dalam pengaruh Barat adalah masyarakat kafir.

Ahmad Shukri Mustafa adalah pemimpin yang autokratis yang sangat dita'ati oleh pengikutnya. Kekuatan pengaruhnya didukung oleh keyakinan bahwa ia adalah sang Mahdi. Dengan prestise itu, ia mampu menjadikan Jama'ah Takfir sebagai organisasi yang penuh dengan kedisiplinan.

Pada tahun 1979, berdiri kelompok fundamentalis lainnya yaitu Jihâd, sebuah kelompok yang tidak segan-segan mengkafirkan pemerintahan Mesir karena dianggap yang tidak menerapkan hukum Islam, bahkan sampai pada tindak pembunuhan beberapa pejabat dan petinggi negara. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah Muhammad 'Abd al-Salam Faraj. Inti pemikiran kelompok ini tertuang dalam kitab pegangan mereka al Farîdah al Gâibah, bahwa berjihad untuk mendirikan negara Islam itu wajib hukumnya, sebab tujuan ke arah itu tidak bisa direalisasikan kecuali dengan jihad. Karena itu, kelompok ini membolehkan membunuh orang yang dianggap telah melakukan

perbuatan di luar hukum Islam. Banyak sekali terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok ini di masa itu.[23] Di antaranya adalah pelenyapan Menteri Wakaf Mesir pada tahun 1977, melakukan aksi teror dan pengeboman terhadap tempat-tempat yang dianggap kurang Islami, seperti gereja-gereja yang ada di kota Alexandria pada tahun 1980,[24] pembunuhan presiden Anwar Sadat dalam sebuah acara parade militer pada bulan Oktober tahun 1981.

Pembunuhan terhadap Sadat didasarkan oleh kebijakan Sâdât yang terlalu dekat dengan Barat. Mereka menilai bahwa Sâdât, dalam pemerintahannya, terlalu pragmatis, tidak ideologis. Karena pragmatisme Sâdât itulah akhirnya menghasilkan perjanjian Camp David, perjanjian damai Mesir dengan Israel. Sebagai akibat yang harus ditanggung dari sikap Sâdât yang pragmatis itu, akhirnya, pada tahun 1981, Sâdât dibunuh oleh kelompok Jama'ah Jihad ini.

Berbeda dengan Jama'ah Takfir, gerakan Jihad ini tidak dipimpin oleh satu pemipin kharismatik, akan tetapi oleh kepemimpinan kolektif yang disebut dengan Majlis al Shura. Dalam merekrut anggotanya, kelompok ini lebih didasarkan pada ikatan kerabat dan teman dekat. Meskipun demikian, kedua kelompok di atas (Jama'ah Takfir dan Jihad) banyak didominasi oleh anggota yang berasal dari pedesaan, kelas

menengah ke bawah, dan melanjutkan studinya di kota. Mereka memiliki prestasi akademik yang baik terutama di bidang teknologi dan sains.

Ada faktor lain yang menyebabkan berkembangnya kelompok-kelompok radikal di Mesir pada tahun 1970-an itu, yaitu respon terhadap pengaruh modernitas, dominasi Barat, penyelewengan kekuasaan oleh para elite, dan serangkaian krisis ekonomi dan sosial, yang berimplikasi pada krisis identitas.

Maka aksi-aksi itu, selain karena alasan ideologis, juga politis, di mana mereka menilai bahwa setelah Mesir berdamai dengan Israel dan menjadi negeri yang patuh pada AS, tidak ada perkembangan kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat. Semboyan al rafâhiyyah ba'da al salâm (kemakmuran setelah perdamaian) tidak pernah kunjung datang. Sebaliknya, pengangguran semakin meluas, perumahan semakin sulit, jalan-jalan semakin tidak tertib dan tidak tampak tanda-tanda berkurangnya kemiskinan. Karena itu, krisis pembunuhan presiden tidak berpengaruh pada revolusi Islam ekstremis utama atau serangan balasan sekuler yang signifikan, bahkan arus politik di Mesir menjadi lebih berorientasi Islami, mengarah pada Islamisasi undang-undang dan Islamisasi terhadap berbagai bidang atau sendi kehidupan masyarakat.

Kelompok-kelompok Islam itu terus berkembang dan semakin kuat hingga masa pemerintahan Muhammad Husnî Mubârak (1982),

pengganti Sâdât. Selma Hotman menyebutkan bahwa abad ke-20 adalah abad pergerakan bagi kelompok Islam garis keras.[30] Pada tahun 1990-an ini banyak tokoh agama terkenal dan berpengaruh yang berpendidikan Islam konservatif menyampaikan pesan-pesan, yang jika disampaikan pada tahun 1960-an di Mesir akan membuat penyampainya dipenjara, atau mungkin dieksekusi. Pada masa ini, mereka dengan bebas memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan politik bangsa Mesir. Kepemimpinan intelektual sekuleris menjadi terbatasi dan sering diancam dengan kekerasan oleh para Islamis militan ini, seperti yang terjadi pada Novelis pemenang hadiah Nobel, Naguib Mahfoud, yang ditikam oleh seorang muslim fanatik, dan Farag Fawda, seorang pemimpin intelektual publik sekuler, yang terbunuh pada tahun 1992.

Pada masa pemerintahan Mubarak ini nampak bahwa penguasaan ekstremisme keagamaan di Mesir semakin meningkat, gangguan terhadap turis asing semakin sering terjadi, ketegangan antara Islam kanan dan kiri juga cenderung menguat, kekacauan politik seolah-olah makin menempel akrab dalam sistem pemerintahan Mubârak. Surat Kabar Mesir melaporkan bahwa ada puluhan organisasi keagamaan militan di Mesir pada masa itu. Sekarang kabarnya ada sekitar ratusan. Tentu saja jumlah ini hanya terbatas pada kelompok yang telah diungkap

oleh keamanan Mesir. Mungkin masih ada organisasi-organisasi militan lainnya yang hanya diketahui bila dibongkar.

Sesungguhnya pokok pemikiran dari gerakan fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Kitab Ma'alim fi al Tariq, karya Sayyid Qutb, tokoh figur mereka, pengakuan terhadap Hâkimiyyat Allâh. Landasan berpikir seperti ini adalah kalimat tauhid lâ ilâha illa Allâh. Yang berarti; tiada tuhan selain Allah, dan tiada otoritas dan syariat kecuali syariat dan otoritas Allah, sehingga ia berimplikasi epistemologis pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah, dan berimplikasi epistemologis pada pemberian label musyrik, kafir, fasik dan zalim bagi siapa saja yang tidak menegasikan selain Allah dan syariat-Nya.

Dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan hakimiyat allah, dalam pengertian yang lain bahwa siapapun yang enggan menegasikan sistem selain Allah, atau menolak dan memusuhi kedaulatan dan sistem Allah (hâkimiyyât Allâh dan syariat Allah), adalah musyrik jahiliyyah, karena mereka telah mensekutukan Tuhan dengan mengakui otoritas selain-Nya dan menggunakan sistem selain sistem-Nya, dan barang siapa yang enggan menerapkan syariat Islam adalah kafir, fasik, dan zalim dan harus diperangi. Landasan

teorinya adalah firman Allah ”...wa man lam yahkum bi mâ anzala Allâh fa ulâika hum al-kâfirûn...al-dzâlimûn...al-fasiqun” (...barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir...dzalim...fasik).

Idelogi gerakan Takfir dan Jihad adalah pengakuan bahwa Islam yang autentik hanya pernah muncul pada periode Nabi Muhammad di Madinah dan pada masa khalifah pertama dari Khulafa’ al-Rashidin (622-661). Mereka menuntut umat Islam untuk memunculkan kembali prinsip-prinsip itu dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dari kedua kelompok di atas adalah untuk mewujudkan konsep ummah di bawah seorang khalifah, dan penerapan syari’at Islam yang semua itu harus diwujudkan dalam bentuk khilafah.

Landasan pokok dari kelompok Jama’ah al-Takfir wa al-Hijrah adalah tiga hal, yaitu pengkafiran (al takfîr), berhijrah (al hijrah), kebersamaan (al jamâ’ah). Artinya, setiap masyarakat yang tidak menjalankan syari’at Islam, dianggap sebagai masyarakat jahiliah dan layak untuk dikafirkan, sehingga harus dijauhi. Dari situ, setiap pribadi muslim yang taat menjalankan syari’at Islam harus keluar atau berhijrah dari masyarakat jahiliah tersebut, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Akibatnya, kelompok ini mewajibkan setiap muslim harus masuk ke

dalam kelompoknya, dan yang tidak mau begabung ke dalam kelompok ini dianggap telah kafir. Mereka meyakini bahwa Mustafa, tokoh sentral dari gerakan ini adalah seorang Mahdi. Kelompok ini tidak mengakui empat madhab tradisional dalam Islam. Kelompok ini mengklaim bahwa keempat madhab itu telah memonopoli penafsiran al Qur'an untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga mereka telah menutup pintu ijtihad dan menjadikan mereka sebagai bintang pujaan, dan seakan-akan sebagai mediator antara Tuhan dengan orang yang beriman. Karena diduga terlibat dalam pembunuhan salah satu mantan Menteri Negara Mesir, Shukri Mustafa akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh penguasa.

Sementara itu, Jama'ah al-Jihad menekankan pada jihad melawan penguasa dan pemerintahan yang dianggap dhalim dan tidak islami dengan menggunakan kekuatan fisik, sehingga kelompok ini kelihatan lebih sukses dalam melakukan gerakannya daripada gerakan Jama'ah al-Takfir wa al-Hijrah. Dan Jama'ah Jihad ini tidak dipimpin oleh satu pemimpin kharismatik seperti yang terjadi dalam Jama'ah Takfir wa al-Hijrah, akan tetapi oleh kepemimpinan kolektif, yang disebut dengan majlis al-shura, dan diketuai oleh Sheikh Umar 'Abd al-Rahman. Kelompok ini cenderung memilih salah satu madhab fiqh yang ada dalam Islam, terutama Ibn Taymiyah, salah satu penganut Madhab Hanbali. Dan kelompok al-Jihad ini mengakui empat madhab fiqh tradisional dalam

Islam itu, sehingga memudahkan umat Islam untuk masuk ke dalam kelompok al-Jihad ini, atau karena mendapatkan kesamaan antara ajaran yang telah diketahuinya dengan beberapa ajaran yang ada di dalam kelompok al-Jihad ini.

Sementara itu, dalam tinjauan sosiologis, tindakan radikal dari gerakan fundamentalisme Islam juga muncul karena adanya penekanan dan penindasan. Pada Bulan September 1981 misalnya, pemerintahan Anwar Sadat menetapkan undang-undang subversi 'al-fitnah al taifiyyah'. Lalu aktivis Ikhwan Muslimin yang dianggap oposan dipenjara. Dan dalam penjara inilah akhirnya mereka mendirikan Jama'ah al-Jihad. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1981, kelompok yang berpegangan pada buku radikal "Al-Faridah Al-Gha'ibah" itu, membunuh Presiden Anwar Sadat. Dari kasus itu, maka cukup tepat untuk mengatakan bahwa gerakan muslim fundamentalis, secara sosiologis, timbul karena pernah ditindas atau ditekan. Jadi, kemunculan kelompok muslim fundamentalis tidak hanya ditimbulkan oleh faktor ideologis saja, tapi faktor sosial juga mempunyai andil besar di dalam 'mengorbitkannya'.

Maka tidak heran jika Mahmud Ismail mengatakan; "krisis radikalisme awalnya adalah krisis realitas yang disusul oleh krisis pemikiran." Atau dengan kata lain; timbulnya gerakan muslim fundamentalis adalah karena merespon realitas. Namun, benarkah

fenomena ini hanya merespon realitas saja tanpa ambisi politik di belakangnya?

Dalam tinjauan politis, fenomena muslim fundamentalis sering disebut dengan Islam politik, yaitu sebuah gerakan sempalan dari umat Islam yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk menggapai suara publik dan kekuasaan, lalu berusaha mengganti sistem yang ada dengan sistem Islam versi mereka.

Bagi Farag Ali Faudah, fenomena semacam ini adalah bagian dari problem politik negara, karena, dengan kemunculannya, negara menjadi bahan dialog keagamaan, partai politik yang sejatinya tidak berbasis agama ikut-ikutan mempolitisir agama, dan konstelasi politik elit negara dijejali dengan orang-orang awam politik. Dengan istilah lain, fenomena ini telah mengotori sakralitas dan religiusitas agama, dan telah merancang sistem yang nonproporsional, karena Islam yang seharusnya sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, telah disempitkan oleh sekelompok muslim ke dalam area politik yang terbatas.

Menurut analisa psikologi, manusia mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, masa lalu dengan masa kini, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Islam secara umum dan golongan muslim fundamentalis

secara khusus. Mereka kerap membandingkan kemunduran diri dengan kemajuan golongan lain, yaitu kejayaan generasi terdahulu.

Di tengah-tengah upaya perbandingan ini, umat Islam berusaha maju, dengan mengulang kejayaan masa lalu, atau meniru golongan lain, atau membuang satu di antara keduanya, atau membuang keduanya dan berkreasi sendiri. Dalam memilih empat opsi ini, golongan muslim fundamentalis lebih suka memilih pengulangan kejayaan masa lalu dan membuang produk golongan lain. Hingga kemunculan mereka sering disebut dengan golongan revivalis Islam, yang berusaha mengembalikan ajaran Nabi Muhammad secara literal, dan kejayaan umat Islam klasik secara non-historis ke masa kini, serta berusaha untuk membuang hal-hal yang datang dari luar tradisi Islam (baca: puritan). Dari situ, kemunculan fenomena muslim fundamentalis dapat dikatakan sebagai manifestasi dari dorongan psikologis yang membandingkan diri, lalu ingin maju. Perwujudannya merupakan respon dari perasaan mundur yang dialami kaum muslimin. Oleh karenanya, faktor psikologis merupakan faktor lain yang cukup berperan dalam memunculkan fenomena muslim fundamentalis di samping beberapa faktor lain yang telah disebutkan di depan.

Secara ideologis, tindakan radikal muslim fundamentalis timbul dari pemikiran radikal. Mereka muncul dari suatu landasan berpikir yang

didekati dengan metode berpikir ekstrim. Tapi, secara sosiologis, kemunculan gerakan mereka karena adanya penekanan dan penindasan. Dimana pada Bulan September 1981 pemerintahan Anwar Sadat menetapkan undang-undang subversi ‘al-fitnah atthaifiyyah’. Lalu aktivis Ikhwan Muslimin yang dianggap oposan dipenjara,[45] bisa juga dikarenakan kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Jadi, kemunculan kelompok muslim fundamentalis tidak hanya ditimbulkan oleh faktor ideologis saja, tapi faktor sosial juga mempunyai andil besar di dalam ‘mengorbitkannya’.

Maka tidak heran jika Mahmud Ismail mengatakan; “krisis radikalisme awalnya adalah krisis realitas yang disusul oleh krisis pemikiran.”[46] Atau dengan kata lain; timbulnya gerakan muslim fundamentalis adalah karena merespon keadaan realitas.

Sementara itu, secara politis fenomena muslim fundamentalis sering disebut dengan Islam politik, yaitu sebuah gerakan sempalan dari umat Islam yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk menggapai suara publik dan kekuasaan, lalu berusaha mengganti sistem yang ada dengan sistem Islam versi mereka.

Bagi Farag Ali Faudah, fenomena semacam ini adalah bagian dari problem politik negara, karena, dengan kemunculannya, negara menjadi bahan dialog keagamaan, partai politik yang sejatinya tidak

berbasis agama ikut-ikutan mempolitisir agama, dan konstelasi politik elit negara dijejali dengan orang-orang awam politik.

Menurut analisa psikologi, manusia punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, masa lalu dengan masa kini, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Islam secara umum dan golongan muslim fundamentalis secara khusus. Mereka kerap membandingkan kemunduran diri dengan kemajuan golongan lain, yaitu kejayaan generasi terdahulu.

Di tengah-tengah upaya perbandingan ini, umat Islam berusaha maju, dengan mengulang kejayaan masa lalu, atau meniru golongan lain, atau membuang satu di antara keduanya, atau membuang keduanya dan berkreasi sendiri. Dalam memilih empat opsi ini, golongan muslim fundamentalis lebih suka memilih pengulangan kejayaan masa lalu dan membuang produk golongan lain. Hingga kemunculan mereka sering disebut dengan golongan revivalis Islam, yang berusaha mengembalikan ajaran Nabi Muhammad secara literal, dan kejayaan umat Islam klasik secara non-historis ke masa kini, serta berusaha untuk membuang hal-hal yang datang dari luar tradisi Islam (baca: puritan). Dari situ, kemunculan fenomena muslim fundamentalis dapat dikatakan sebagai manifestasi dari dorongan psikologis yang membandingkan diri, lalu ingin maju.

Perwujudannya merupakan respon dari perasaan mundur yang dialami kaum muslimin.

Konklusinya faktor kemunculan gerakan Islam fundamentalis tidak hanya satu. Akarnya beragam dan bercabang, sehingga fenomena yang ditimbulkannya pun dapat dilihat dari berbagai sisi.